

**EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GUNUNG
KELAMBU KECAMATAN BADIRI KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :
AHMAT FAUZY
NPM : 1503100129

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

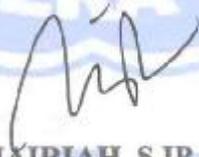
Nama : AHMAT FAUZY
NPM : 1503100129
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judu Skripsi : Efektifitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Medan, 02 Maret 2019

Pembimbing


Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL-KHAIRIAH, S.IP, M.Pd


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Unggah di Cerdas Terpadu

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : AHMAT FAUZY
NPM : 1503100129
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Sabtu, 02 Maret 2019
Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini saya, Ahmat Fauzy. NPM 1503100129, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2019

Yang menyatakan,

Ahmat Fauzy





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dasar & Terapan
 Surat ini agar disebarkan
 ke semua

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ahmat Fauzy
 NPM : 1503100129
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi :

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	05-01-19	- Perbaiki proposal sesuai tanggapan saat Seminar - Lanjutkan penulisan Uraian Bab I s/d Bab III (Materi proposal).	
2.	11-01-19	Perbaiki kembali teknik penulisan dan Perbaiki struktur Organisasi pemerintahan desa.	
3.	25-01-19	- Sempurnakan Uraian narasi sub Bab I, Bab II - Perbaiki Bab III tentang Deskripsi lokasi penelitian.	
4.	19-02-19	Mengarahkan tentang pembahasan pada Bab III	
5.	21-02-19	- Sempurnakan kembali pada Uraian sub bab pembahasan - Lengkapi skripsi dengan Abstrak, Daftar isi, Daftar tabel, kata pengantar, sampai dengan daftar riwayat hidup.	
6.	26-02-19	Perbaiki tata cara penulisan tabel pada Bab III dan IV	
7.	27-02-19	Perbaiki narasi pada daftar isi, Perbaiki kembali Uraian pada Bab V	
8.	28-02-19	Ace Skripsi	

Medan, Februari 2019

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.P.

Rizki Kharidah, S.P., M.P.

Dr. R. Kusniati, M.P.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GUNUNG KELAMBU KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

AHMAT FAUZY
NPM 1503100129

Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan informan penelitian yang terdiri atas 7 orang, maka dalam penelitian ini akan mewawancarai 7 orang informan penelitian yang terdiri atas ; 6 orang aparatur desa dan 1 orang tokoh masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah menjalankan kinerjanya dengan baik dalam setiap pengelolaan dana desa. Pemerintahan desa Gunung Kelambu dalam menjalankan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintahan desa Gunung Kelambu belum maksimal dalam hal sarana dan fasilitas kerja. Pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah transparan dapat setiap pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Efektifitas, Pemerintahan Desa dan Dana Desa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbal'alamin*, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Serangkaian kata terimakasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya sayangi yaitu Ayahanda Jumari dan Ibunda Lega Wati Br. Sinaga yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus

menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah cukup banyak memberikan semangat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan Kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M. I Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Abrar Adhani S. Sos., M. I Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika S. Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. R.Kusnadi., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya.

8. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan saya ilmu semenjak awal perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu dan Bapak Pengawai Kantor Desa Gunung Kelambu yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian di Kantor Kepala Desa Gunung Kelambu.
10. Kepada Yunda Pratiwi., S.I.Kom yang telah memberikan banyak hal baik dalam hidup saya termasuk meyakinkan saya untuk terus melanjutkan hidup meski hanya lewat diam.
11. Kepada Tanisa Tarigan., S.I.Kom yang telah banyak mendukung dan membantu saya selama proses perkuliahan di UMSU
12. Seluruh teman-teman IMM FISIP UMSU Angkatan 2015 khususnya Parmadi, Astri, Esti, Fathia yang memberi dukungan dan berjuang bersama untuk bisa wisuda tepat waktu.
13. Kepada sahabat-sahabat saya: Alfi Khosairi Siregar, Arif Ilham Sirait, Parmadi, Putra Wijaya, Maulida Ulfa, Putri Lestari dan juga teman-teman di Prodi IAP khususnya administrasi pembangunan yang selama ini saling berbagi serta selalu memberikan support, bantuan serta motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari sepenuhnya sebagai penulis pemula tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2019
Penulis

AHMAT FAUZY
1503100129

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
2.1. Efektifitas	9
2.2. Desa dan Pemerintahan Desa	10
2.2.1. Pengertian Desa.....	10
2.2.2. Pengertian Pemerintahan Desa.....	11
2.2.3. Susunan Pemerintahan Desa.....	12
2.3. Pengelolaan	19
2.4. Dana Desa.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1. Jenis Penelitian.....	21
3.2. Kerangka Konsep.....	23
3.3. Defenisi Konsep.....	24
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	25
3.5. Narasumber.....	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
3.7. Teknik Analisa Data	28
3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian	29
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
3.9.1. Gambaran Umum Desa Gunung Kelambu.....	29
a. Sejarah Singkat Desa Gunung Kelambu.....	29
b. Keadaan Demografi Desa.....	30
c. Keadaan Sosial Desa.....	32
d. Sarana Dan Prasarana Desa.....	34
e. Sumber Daya Alam.....	35
f. Sumber Daya Manusia.....	36
g. Sumber Daya Pembangunan.....	37
h. Sumber Daya Sosial Desa.....	38
i. Kondisi Ekonomi.....	39
j. Pembagian Wilayah Desa Desa.....	39
k. Kondisi Pemerintahan Desa.....	41

3.9.2.	Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Desa Gunung Kelambu.....	41
a.	Kepala Desa.....	41
b.	Sekretaris Desa.....	41
c.	Bendahara Desa.....	42
d.	Kepala Urusan Pemerintahan Desa.....	42
e.	Kepala Urusan Pembangunan Desa.....	42
f.	Kepala Urusan Umum.....	43
g.	Kepala Dusun.....	43
h.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	43
3.9.3.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Kelambu.....	44
3.9.4.	Keadaan Pengawai Kantor Desa Gunung Kelambu Berjumlah 9 Orang Dengan Terdiri Dari Nama, Jabatan, Dan Usia.....	46
3.9.5.	Keadaan Pengawai dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Kelambu Berjumlah 9 Orang Dengan Terdiri Dari Nama, Jabatan, dan Usia.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....48

4.1.	Hasil Penelitian.....	48
4.1.1.	Deskripsi Narasumber.....	49
4.1.2.	Hasil Wawancara.....	47
a.	Adanya Kinerja.....	50
b.	Adanya Rencana Sesuai Dengan Pelaksanaan.....	57

c.	Adanya Sarana Dan Fasilitas Kerja Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	64
d.	Adanya Transparansi.....	70
4.2.	Pembahasan.....	76
4.2.1.	Adanya Kinerja.....	77
4.2.2.	Adanya Rencana sesuai Dengan Pelaksanaan.....	80
4.2.3.	Adanya Sarana Dan Fasilitas Kerja Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	83
4.2.4.	Adanya Transparansi.....	87
BAB V PENUTUP.....		90
5.1.	Simpulan.....	90
5.2.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Keadaan Luas Lahan Menurut Peruntukan di Desa Gunung Kelambu	31
Tabel 3.2.	Komposisi Penduduk Desa Gunung Kelambu Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Agama.....	34
Tabel 3.3.	Kondisi Sarana Dan Prasarana Umum Desa Gunung Kelambu Secara Garis Besar	34
Tabel 3.4.	Uraian Sumber Daya Alam Desa Gunung Kelambu.....	35
Tabel 3.5.	Uraian Sumber Daya Manusia	36
Tabel 3.6.	Uraian Sumber Daya pembangunan Di Desa Gunung Kelambu...	38
Tabel 3.7.	Uraian Sumber Daya Sosial.....	39
Tabel 3.8.	Luas Wilayah Desa Gunung Kelambu.....	40
Tabel 3.9.	Keadaan Pengawai Kantor Desa Gunung Kelambu.....	46
Tabel 3.10.	Keadaan Pengawai Dan Anggota BPD Di Desa Gunung Kelambu.....	46
Tabel 4.1.	Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa	24
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Kelambu.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*Empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi - inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi - fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- 1) Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain - lain pendapatan asli desa;
- 2) Alokasi APBN (Dana Desa);
- 3) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- 4) Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10 %;
- 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan 6 dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tetang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tapanuli Tengah ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian “Efektivitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pemerintahan

Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pemerintahan khususnya ilmu administrasi negara.
- 2) Secara teoritis, peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU serta menambah cakrawala dan wawasan peneliti.
- 3) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya kepada pemerintahan desa di desa Gunung Kelambu kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengefektivitas pengelolaan dana desa.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) **BAB I PENDAHULUAN**

Yaitu uraian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2) **BAB II URAIAN TEORITIS**

Yaitu uraian yang menjelaskan tentang efektivitas, desa, pemerintahan desa, pengelolaan dan dana desa.

3) **BAB III METODE PENELITIAN**

Yaitu uraian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

4) **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Yaitu uraian yang menjelaskan tentang analisis data, penyajian data, pengolahan data.

5) **BAB V penutup**

Yaitu uraian yang menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Efektivitas

Menurut Pekei (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Pengertian lain dari efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Faktor penentu efektivitas sebagai berikut.

- 1) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Tangkilisan (2005:139) mendefinisikan efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

2.2. Desa dan Pemerintahan Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Edi Indrizal dalam V. Wiratna sujarweni (2015:1) Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nurcholis (2011:24) menyebutkan desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai '*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*'. Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

2.2.2. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Sujarweni (2015:7) Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka terbitlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3. Susunan Pemerintahan Desa

Desa memiliki struktur atau susunan organisasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan dari masing-masing desa. Yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa diberikan beberapa wewenang seperti yang tercantum dalam PP no. 72 tahun 2005, seperti :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban pokok kepala desa adalah sebagai berikut :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 4) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
- 5) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 6) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- 7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 8) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- 9) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 10) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

- 11) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 12) Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 13) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban-kewajiban pokok di atas, kepala desa juga berkewajiban untuk

- 1) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat sekali dalam satu tahun
- 2) Memberikan Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD dalam musyawarah BPD setidaknya sekali dalam setahun.
- 3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun dapat diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa maupun media lainnya.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun. Adapun fungsi BPD :

- 1) Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa.

- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Adapun Wewenang BPD adalah sebagai berikut :

- 1) Bersama Kepala desa melakukan pembahasan rancangan peraturan desa
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib BPD

Dan Hak dari BPD adalah sebagai berikut :

- 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- 2) Menyatakan pendapat

c. Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan dan tugas-tugas lain seperti :

- 1) Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa.

- 2) Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat

Adapun fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pelaksana bagian surat menyurat, arsip, serta laporan
 - 2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan
 - 3) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - 4) Melaksanakan fungsi serta tugas kepala desa apabila kepala desa sedang berhalangan.
 - 5) Melaksanakan urusan perlengkapan serta kerumahtangana desa
 - 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa
- d. Kepala Urusan Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa
- 2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat
- 3) Sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa
- 4) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa

Adapun tugas-tugas kepala urusan pemerintahan adalah :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di bidang teknis dan administrasi
- 2) Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis, administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa
- 4) Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa
- 5) Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

e. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan pembangunan memiliki tugas-tugas yakni sebagai berikut :

- 1) Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi
- 2) Membantu pembinaan perekonomian desa
- 3) Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa
- 4) Menggali serta memanfaatkan potensi desa

Adapun Fungsi kepala urusan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan di desa
- 2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam upaya pembinaan perekonomian desa serta melakukan inventarisasi potensi-potensi yang ada di desa.

f. Kepala urusan Umum

Kepala urusan umum juga merupak bagian strukur organisasi pemerintahan desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Berikut adalah tugas dan fungsi kepala urusan umum :

- 1) Membantu tugas kepala desa dibidang teknis maupun administrasi pemerintahan desa
- 2) Memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat
- 3) Melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset pemerintah
- 4) Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan
- 5) Melakukan pembinaan serta pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan

Adapun fungsi kepala urusan umum adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
- 2) Sebagai pelaksana inventarisasi, pembinaan, serta pelestarian kebudayaan yang ada di desa

- 3) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan.

g. Kepala dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan dan fungsi lainnya seperti :

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya
- 2) Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya
- 3) Sebagai pelaksana kebijakan desa

2.3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan se&ara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal,

administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

2.4. Dana Desa

Menurut Herlianto (2017:65). Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Menurut Creswell dalam Jamaluddin Ahmad (2015:52) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dari mulai tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Adapun karakteristik penelitian kualitatif dapat di kemukakan sebagai berikut :

- 1) Penelitian kualitatif bersifat alamiah (naturalistic), yakni latar langsung sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument).

- 2) Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yakni, data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrips wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.
- 3) Di samping hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupi, di samping data yang dihasilkannya.
- 4) Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.
- 5) Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna berdasarkan proses mendeskripsi makna yang disusun subyek.

Berikut adalah proses pelaksanaan penelitian kualitatif :

- 1) Menentukan fenomena yang akan dikaji/dijelaskan.
Dikarenakan penelitian kualitatif bersifat sintetik dalam pendekatannya, maka pada tahap tertentu perlu mempersempit fokus observasi. Digunakan unit dan sub set dalam hirarki penelitian.
- 2) Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data.
Penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat/cara untuk mengumpulkan data. Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan atau kejadian secara lengkap, sering kali digunakan metode-metode yang berbeda sekaligus dalam satu penelitian, tidak seperti penelitian eksperimen yang bergantung

pada satu pendekatan. Cara-cara memperoleh data kualitatif antara lain : observasi, perekaman, kuesioner, wawancara, case history, catatan lapangan dan sebagainya.

- 3) Mencari pola-pola dalam data.

Data pada penelitian kualitatif merupakan data mentah yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Begitu data dikumpulkan, maka peneliti harus menyaring data.

- 4) Validasi kesimpulan-kesimpulan awal dengan mengulang data atau mengumpulkan lebih banyak data.

Ketika pola-pola telah teridentifikasi di dalam data, peneliti, akan memvalidasi penemuannya. Penelitian memvalidasi penemuan melalui triangulasi karena penggunaan metode yang beragam dalam pengumpulan data.

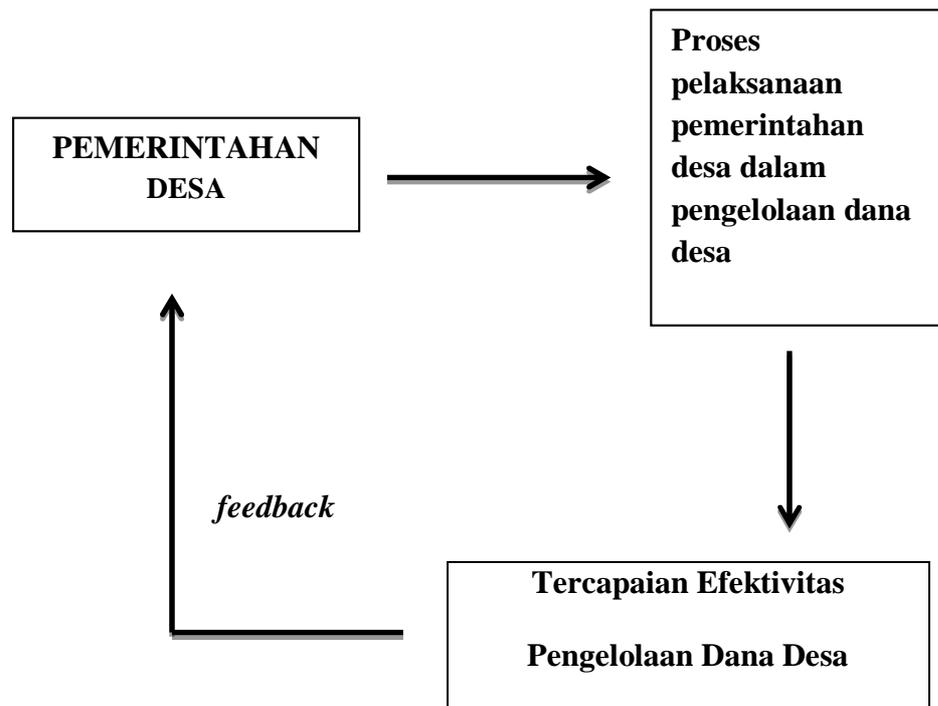
- 5) Mendaur ulang (*recycle*) melalui proses atau data.

Setelah melakukan tahap awal analisis data, perlu menetapkan kembali wilayah penelitian dan menyempitkan fokus. Proses ini diilustrasikan seperti sebuah corong.

3.2. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut

Gambar 3.1
Kerangka Konsep Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan
Dana Desa



3.3. Defenisi Konsep

Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Defenisi konsep juga berdasarkan dari uraian teoritis yang telah di kemukakan sebelumnya

Tujuan definisi konsep adalah untuk memberi batasan terhadap pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program

dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

- 2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi.
- 5) Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Adanya kinerja
- 2) Adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan

- 3) Adanya sarana dan fasilitas kerja dalam penyelenggaraan dana desa.
- 4) Adanya transparansi

3.5. Narasumber

Dalam penelitian ini data data yang diperoleh dari informan atau narasumber adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelola Dana Desa Di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Kriteria memilih informan adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- 2) Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
- 3) Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- 4) Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Informan atau narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Bendara Desa
- 4) Ketua Tim Pengelola Kegiatan
- 5) Badan Permusyaratan Desa (BPD)
- 6) Kaur Pembangunan
- 7) Stake Holders (Tokoh masyarakat dan Pemuka agama)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Dalam penelitian, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

- a) Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
2. Teknik pengumpulan data sekunder
Sumber data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga memberikan gambaran tentang efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada pun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

- 1) Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
- 2) Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

- 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2018 sampai bulan Januari 2019 di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1. Gambaran Umum Desa Gunung Kelambu

a. Sejarah Singkat Desa Gunung Kelambu

Desa Gunung Kelambu terletak didalam wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Desa Gunung Kelambu berada pada ketinggian 0 m s/d 30 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah \pm 3,57 Km². Jarak Desa Gunung Kelambu dari ibukota Kecamatan sejauh 2 Km. Selain memiliki daerah pantai dan dataran Desa Gunung Kelambu juga memiliki daerah pegunungan yang cukup luas, dimana bukit dan pegunungan tersebut belum semua dikelola dengan baik.

Dinamakan desa Gunung Kelambu dikarenakan desa ini dikelilingi oleh bukit/gunung yang menutupi desa ini. Desa inipun kemudian dibagi menjadi 4

(empat) dusun yang masing-masing letaknya berdekatan. Dimana nama-nama dusun tersebut dibuat berdasarkan tempatnya.

b. Keadaan Demografi Desa

1) Letak dan Luas Desa

Desa Gunung Kelambu terbentuk atas 4 (empat) Dusun, memiliki luas wilayah $\pm 3,57$ km², dengan perincian sebagai berikut :

- a) Dusun I : ± 152 Ha
- b) Dusun II : ± 318 Ha
- c) Dusun III : ± 205 Ha
- d) Dusun IV : ± 599 Ha

Desa Gunung Kelambu masuk dalam wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Berjarak ± 2 Km dari ibu kota Kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Desa Kebun Pisang/Gunung Kelambu
- b) Sebelah Timur : Desa Pagaran Honas/Toga Basir
- c) Sebelah Selatan : Kelurahan Hutabalang dan Kelurahan Pinang Baru
- d) Sebelah Barat : Kelurahan Hutabalang

2) Peruntukan dan Manfaat Lahan

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Gunung Kelambu dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan Perkebunan/pertanian dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Gunung Kelambu dapat terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 3.1.
Keadaan Luas Lahan menurut Peruntukan di Desa Gunung Kelambu

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha/m)	Presentase (%)
1	Persawahan	20	
2	Tegalan/ Perladangan	24	
3	Perkebunan / Pertanian	300	
4	Perumahan/ Pemukiman	100	
5	Kolam/ Perikanan	0	
6	Hutan	830	
7	Perkantoran/ Sarana Sosial		
	a. Kantor/ Balai Desa	1 Unit	
	b. Pustu/Posyandu	2 Unit	
	c. Gereja	3 Unit	
	d. Musholla/Mesjid	1 Unit	
	e. SDN	1 Unit	
	f. SDS	1 Unit	
	g. Lapangan Olahraga	1 Unit	
	h. Pasar Desa	0 Unit	
	i. Jalan Umum/ Jalan Dusun	7,7 Km	
	j. Saluran Irigasi Tersier	0 Km	
	k. Saluran Irigasi Pembuang	0 Km	
	l. SMPN	0	
	m. SMPS	0	
	n. SMAN	0	
	o. SMAS	0	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

3) Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan di Desa Gunung Kelambu terbagi dalam tiga bagian

yaitu :

- a) Milik Rakyat : 1273,96 Ha
 b) Milik Desa : 0,04 Ha

4. Keadaan Tanah

Tanah di Desa Gunung Kelambu merupakan tanah yang sangat subur yang berada di Dusun I, II, III dan IV. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Gunung Kelambu cocok untuk lahan pertanian seperti : karet, coklat, durian, padi, dll.

c. Keadaan Sosial Desa

Penduduk Desa Gunung Kelambu berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari batak toba, jawa, Mandailing, Minang, Melayu, Bugis dan nias, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Gunung Kelambu. Dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Gunung Kelambu mempunyai jumlah penduduk 3831 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2098 Jiwa, perempuan 1733 Jiwa dan 475 KK yang terdiri dalam 4(empat) dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk :

- 1) Dusun I : 565 org
 2) Dusun II : 1267 org

- 3) Dusun III : 1666 org
- 4) Dusun IV : 333 org

Tingkat Pendidikan :

- 1) Tidak Sekolah : 1203 org
- 2) Tamat SD : 450 org
- 3) Tamat SLTP : 960 org
- 4) Tamat SLTA : 1070 org
- 5) Lulus Sarjana : 150 org

Karena Desa Gunung Kelambu merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Pekerjaan :

- 1) Petani : 2281 org
- 2) Pedagang : 270 org
- 3) PNS : 150 org
- 4) Buruh : 956 org
- 5) Nelayan : 54 org
- 6) Peternak : 55 org
- 7) Pegawai lainnya : 67 org

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Adalah sebagai berikut :

Kepemilikan Ternak :

- 1) Unggas : 5000 ekor

- 2) Kambing : 100 ekor
 3) Sapi : 30 ekor
 4) Kerbau : 0 ekor
 5) Babi : 0 Ekor

Tabel 3.2.
Komposisi Penduduk Desa Gunung Kelambu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama Terlihat Pada Tabel Berikut :

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk			Agama				
		Lk	Pr	Total	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Dusun I	303	262	565	355	210	0	0	0
2.	Dusun II	784	483	1267	865	402	0	0	0
3.	Dusun III	838	828	1666	1066	600	0	0	0
4.	Dusun IV	173	160	333	163	170	0	0	0
JUMLAH		2098	1733	3831	2449	1382	10	0	0

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

d. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.3.
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Gunung Kelambu secara garis besar adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Desa			
No	Sarana/ Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	
2	Kantor Desa	0 Unit	
3	Pustu	2 Unit	
4	Gereja	3 Unit	
5	Mesjid	1 Unit	

6	Mushola	1 Unit
7	Pos Kamling	0 Unit
8	Taman Kanak-kanak	0 Unit
9	Pos Polisi	0 Unit
10	SD Negeri	1 Unit
11	SLTP Negeri	0 Unit
12	SLTA Negeri	0 Unit
13	Madrasah Diniyah Awallyah	1 Unit
14	Cek Dam	0 Unit
15	Tempat Pemakaman Umum	3 Ha
16	Sungai	7 Km
17	Jalan	7,7 Km
18	Lumbung Tani	0 Unit
19	Prasarana Air Bersih/ MCK	0 Unit
20	Bangunan Irigasi	0 Unit

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

e. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa Gunung Kelambu adalah potensi desa yang menjadi aset utama desa yang dimiliki dan di kelola oleh masyarakat desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendukung sektor pembangunan, kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 3.4.
Uraian Sumber Daya Alam Desa Gunung Kelambu
(Sesuai dengan Format Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material batu kali dan kerikil	500	M3

2.	Pasir urug	1.000	M3
3.	Lahan Tambang/ Galian	0	Ha
4.	Lahan Persawahan	20	Ha
5.	Lahan Hutan	830	Ha
6.	Sungai	1	Ha
7.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Kopi, Sawit, Umbi-umbian, Karet dll.	324	Ha
8.	Air terjun	1	Bh

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

f. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Gunung Kelambu merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh desa guna mendukung program-program baik desa, pemerintah Pusat maupun Daerah yang dimana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan adalah Sumber Daya Manusia yang kuat.

Tabel 3.5.
Uraian Sumber Daya Manusia
(Sesuai dengan Format Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	2098	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1733	Orang
	c. Jumlah Keluarga	475	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	2281	Orang

	b. Pembangunan dan Penggalian	0	Orang
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, kerajinan, dll)	0	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	270	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	0	Orang
	f. Jasa	1010	Orang
	g. PNS	170	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	150	Orang
	b. Lulusan SLTA	1070	Orang
	c. Lulusan SLTP	960	Orang
	d. Lulusan SD	450	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekola	1223	Orang

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

g. Sumber Daya Pembangunan

Secara umum Sumber Daya Pembangunan yang ada di Desa Gunung Kelambu merupakan hasil dari kerja keras pemerintah desa, bangunan pemerintah Daerah, Pusat dan Provinsi dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadikan desa sebagai tonggak pembangunan Nasional.

Tabel 3.6.
Uraian Sumber daya Pembangunan yang dimiliki Desa
(Sesuai dengan Format Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	7,7	Km
	b. Jembatan	0	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	0	Unit
	b. Gedung TK	0	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Gedung SLTP	0	Unit
	e. Gedung SLTA	0	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	0	Unit
	c. MCK	0	Unit
	d. Sarana Air Bersih	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	0	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha (termasuk SPP)	10	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang sehat (termasuk SPP)	10	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	40 Juta	Rupiah
	b. Total pinjaman di masyarakat	40 Juta	Rupiah

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

h. Sumber Daya Sosial Desa

Dari keragaman etnis masyarakat Desa Gunung Kelambu tercermin etnis budaya dan adat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan

dilingkungan masyarakat desa. Dari berbagai etnis, adat dan kebiasaan di desa maka tergambar jumlah Data Sumber Daya Soasial Budaya yang ada di Desa;

Tabel 3.7.
Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
(Sesuai dengan Format Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Tortor Batak Toba	1	Kelompok
2.	Kuda Kepang	1	Kelompok

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

i. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Gunung Kelambu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, nelayan, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga medis dll.

j. Pembagian Wilayah Desa

1. Batas Wilayah

e) Sebelah Barat berbatasan Kelurahan Hutabalang

f) Sebelah Timur berbatasan dengan Pagaran Honas/Toga Basir

- g) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel.Hutabalang/Kel.Pinang Baru
 - h) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebun Pisang/Lubuk Ampolu
2. Topografi dan Jenis Tanah
- a) Desa Gunung Kelambu berada pada Kecamatan Badiri
 - b) Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 20°
 - c) berada pada ketinggian rata-rata 0 m – 30 m dpl.
3. Iklim
- Karena letaknya yang berbukit-bukit dan masih dikelilingi oleh hutan yang sangat luas maka Desa Gunung Kelambu termasuk beriklim tropis dengan kelembaban rata-rata 25° serta curah hujan cukup tinggi mencapai 3000- 3500 mm/tahun.
4. Luas Wilayah
- a) Luas Wilayah Desa 1274 Ha

Tabel 3.8.
Luas Wilayah Desa Gunung Kelambu

No	Penggunaan lahan	Jumlah Ha
1	Persawahan	20
2	Pemukiman	100
3	Perkebunan/ Hutan Rakyat	1146
4	Perikanan	0
5	Hutan Milik Negara	0
6	Pendidikan	0

7	Perkantoran	0
8	Lapangan	0
9	Pemakaman	3
10	Tempat Peribadatan	5
11	Hutan Rimba	0

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

k. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Gunung Kelambu dibagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, III dan Dusun IV dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun III (tiga), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

3.9.2. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Desa Gunung Kelambu

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

b. Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang

sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan dan tugas-tugas lain.

c. Bendahara Desa

Fungsi utama perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur (tidak terserap).

d. Kepala Urusan Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa dan memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa, sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat.

e. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan pembangunan memiliki tugas-tugas yakni sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi, membantu pembinaan

perekonomian desa, dan mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa.

f. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum juga merupakan bagian struktur organisasi pemerintahan desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Adapun tugas dan fungsi kepala urusan umum yaitu membantu tugas kepala desa dibidang teknis maupun administrasi pemerintahan desa, memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat, melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset pemerintah, serta melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan.

g. Kepala Dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan.

h. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari

penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat. Adapun tugas dan fungsi BPD yaitu Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3.9.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Kelambu

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Kelambu Terdiri Atas

Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 Orang, terdiri dari :

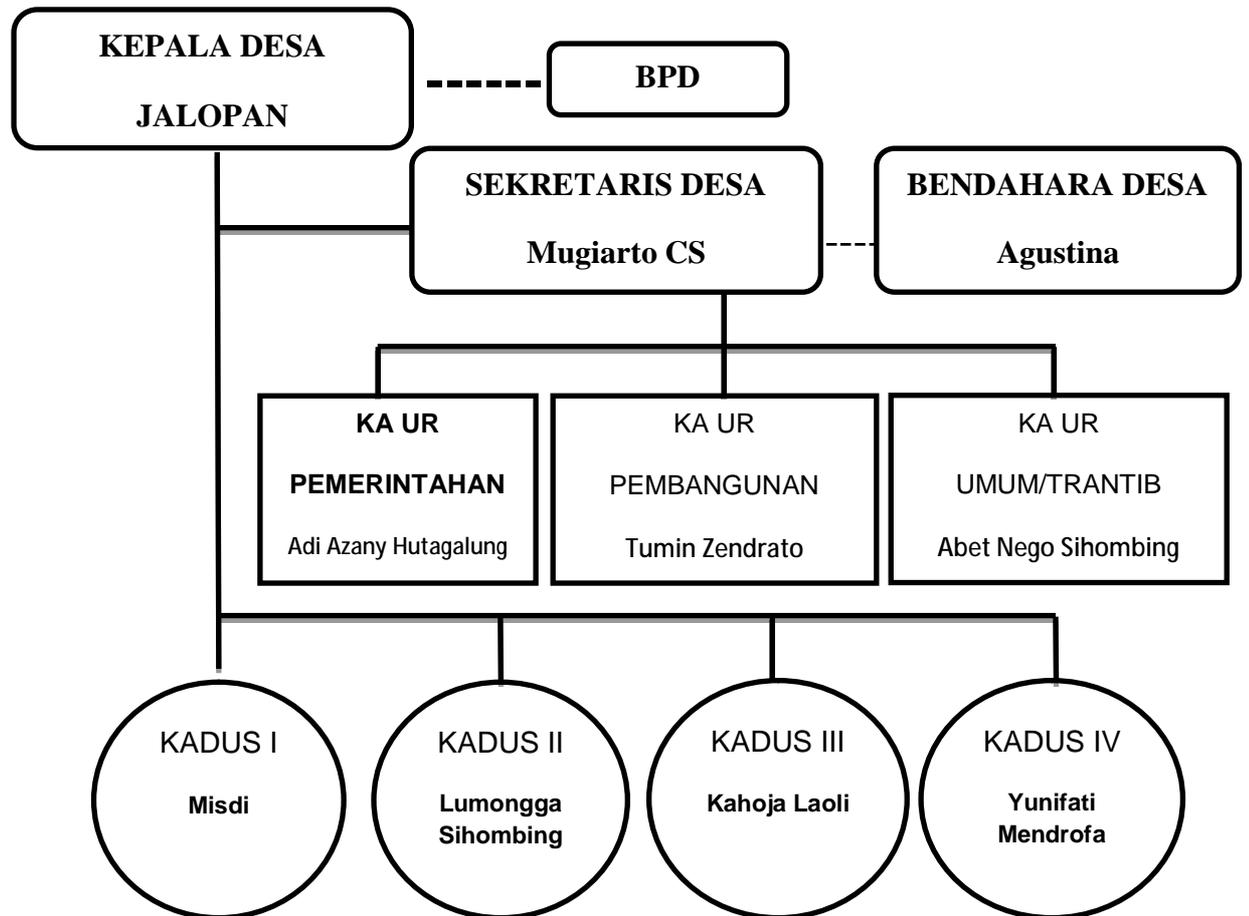
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Kepala Urusan Pemerintahan
5. Kepala Urusan Pembangunan
6. Kepala Urusan Umum/Trantib
7. Kepala Dusun I
8. Kepala Dusun II
9. Kepala Dusun III
10. Kepala Dusun IV

Badan Perwakilan Desa sebanyak 7 orang. Terdiri dari

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota

Gambar 3.2.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Kelambu



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

3.9.4. Keadaan Pengawai Kantor Desa Gunung Kelambu Berjumlah 9 Orang Dengan Terdiri dari Nama, Jabatan Usia Sebagai Berikut :

Tabel 3.9.
Keadaan Pengawai Kantor Desa Gunung Kelambu

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Jalopan	Kepala Desa	52
2.	Mugi Harto. Cs	Sekretaris Desa	37
3.	Agustina	Bendahara Desa	42
4.	Adi Azhari Hutagalung	Kaur Pemerintahan	38
5.	Tumin Indarto	Kaur Pembangunan	59
6.	Abet Nego Sihombing	Kaur Umum	35
7.	Misdi	Kadus I	56
8.	Lumonggu Sihombing	Kadus II	59
9.	Supratman	Kadus III	42
10.	Faoma Salim Laoli	Kadus IV	39

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

3.9.5. Keadaan Pengawai dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Kelambu Berjumlah 9 Orang Dengan Terdiri Dari Nama, Jabatan, dan Usia Sebagai Berikut :

Tabel 3.10.
Keadaan Pengawai dan Anggota BPD di Desa Gunung Kelambu

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Poltak Pakpahan	Ketua BPD	56
2.	Hotbin Sihotang	Sekretaris BPD	54
3.	Sarjunni Sitompul	Anggota BPD	55
4.	Saimin	Anggota BPD	58
5.	Ahmad Ruaya Sitohang	Anggota BPD	67

6.	Sutrisno	Anggota BPD	52
7.	Suyatmin	Anggota BPD	54
8.	Ando Agus Sihaloho	Anggota BPD	36
9.	Jefri Purba	Anggota BPD	34

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 7 orang informan penelitian yang terdiri atas 6 orang aparatur desa di desa Gunung Kelambu dan 1 orang tokoh masyarakat di desa Gunung Kelambu.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai kantor Desa Gunung Kelambu dan ketua BPD. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Jalopan	Kepala Desa	52
2.	Mugiharto Cs	Sekretaris Desa	37
3.	Agustina	Bendahara Desa	42
4.	Tumin Indarto	Kaur Pembangunan	59
5.	Efendi Parsaoran Tambunan	Ketua TPA (Tim Pengolahan Anggaran)	50
6.	Poltak Pakpahan	Ketua BPD	56
7.	Hotman Sihombing	Tokoh Masyarakat	65

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Gunung Kelambu

4.1.2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan - pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan peneliti. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Adanya Kinerja

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Jalopan, selaku kepala desa di Desa Gunung Kelambu. Tentang pertanyaan bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu Dalam Pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan mengajak

masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana belanja mengatakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan diawasi atau di pantau oleh seluruh lapisan masyarakat, kantipt mas, babinsa, pihak kecamatan, inspektorat, PMD (Pemberdayaan Masyarakat desa) Tapanuli Tengah, dan melakukan semua pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan bapak Mugiharto Cs, selaku sekretaris desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu Dalam Pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau Mengatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan mengajak

masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana beliau mengatakan bahwa belum mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan diawasi atau di pantau oleh seluruh lapisan masyarakat, kanti mas, babinsa, pihak kecamatan, inspektorat, PMD (Pemberdayaan Masyarakat desa) Tapanuli Tengah, dan melakukan semua pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 februari 2019, dengan ibu Agustina, selaku Bendahara desa di Desa Gunung Kelambu. Tentang pertanyaan bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu Dalam Pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau Mengatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana beliau mengatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan desa membuat laporan akhir yang di tunjukkan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 februari 2019, dengan bapak Efendi Parsaoran Tambunan, ketua Tim Pengelola Anggaran di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu Dalam Pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dan dalam setiap pelaksanaan sudah sesuai dengan Rapat Anggaran Biaya (RAB).

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau Mengatakan bahwa masih banyak kekurangan namun masih bisa di atasi dengan baik.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana

beliau mengatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa pemerintah desa selalu membuat laporan akhir dan membuat rapat untuk mempertanggungjawabkan kepada desa setiap pekerjaan telah sesuai dengan apa yang sudah di musyawarah sebelumnya

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Poltak Pakpahan, selaku ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam Pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa meskipun faktor cuaca, suplai bahan yang terkadang tidak tepat waktu, dan kurangnya respon masyarakat dalam menghadiri undangan untuk bermusyawarah.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dan setiap pengerjaan kegiatan tidak di berikan kepada pihak ketiga atau dengan kata lain masyarakat desa secara suka rela bergiliran dalam setiap pengerjaannya.

Tentang pertanyaan bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana beliau mengatakan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis dan peraturan keuangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Tumin Indarto, selaku Kaur Pembangunan di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam Pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau Mengatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mempertanggung jawabkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana beliau mengatakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan di awasi atau di pantau oleh seluruh lapisan masyarakat, kanti

mas, babinsa, pihak kecamatan, inspektorat, PMD (Pemberdayaan Masyarakat desa) Tapanuli Tengah, dan melakukan semua pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 05 februari 2019, dengan bapak Hotman Sihombing, selaku Tokoh masyarakat di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam Pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau Mengatakan bahwa sudah meskipun tidak di pungkiri masih ada faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan bagaimana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mempertanggung jawabkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana beliau mengatakan bahwa desa Gunung Kelambu mengedepankan musyawarah

dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.

b. Adanya Rencana Sesuai Dengan Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Jalopan, selaku kepala desa di Desa Gunung Kelambu. Tentang pertanyaan apa saja rencana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata.

Tentang pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan bapak Mugi Harto Cs, selaku sekretaris desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apa saja rencana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembanyaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata.

Tentang pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 februari 2019, dengan ibu Agustina, selaku Bendahara desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apa saja rencana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan lain-lain.

Tentang pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa

kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 februari 2019, dengan bapak Efendi Parsaoran Tambunan, ketua Tim Pengelola Anggaran di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apa saja rencana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata.

Tentang pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa

kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Poltak Pakpahan, selaku ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apa saja rencana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan limbah, dan TPT (Tembok Penataan Tebing).

Tentang pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kendala yang di hadapi dalam dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa hampir tidak ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Tumin Indarto, selaku Kaur Pembangunan di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apa saja rencana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembanyaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata.

Tentang pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 05 februari 2019, dengan bapak Hotman Sihombing, selaku Tokoh masyarakat di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apa saja rencana Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni pengembangan BUMDes, pengembangan perkampungan, pembuatan lubang larangan dan Lain-lain.

Tentang pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam mencapai rencana yang sudah ditetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam musyawarah desa.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebab ada beberapa program yang sifatnya berkesinambungan.

Tentang pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya tidak ada.

c. Adanya Sarana Dan Fasilitas Kerja Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Jalopan, selaku kepala desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung kelambu beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu telah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain.

Tentang pertanyaan apa saja yang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan bapak Mugi Harto Cs, selaku sekretaris desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung kelambu beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu telah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain.

Tentang pertanyaan apa saja yang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 februari 2019, dengan ibu Agustina, selaku Bendahara desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung kelambu beliau mengatakan sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu telah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain.

Tentang pertanyaan apa saja yang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 februari 2019, dengan bapak Efendi Parsaoran Tambunan, ketua Tim Pengelola Anggaran di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung kelambu beliau mengatakan bahwa sarana dan

fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu telah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain.

Tentang pertanyaan apa saja yang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Poltak Pakpahan, selaku ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung kelambu beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu telah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan namun masih perlu di maksimalkan lagi.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, alat-alat dan fasilitas lain.

Tentang pertanyaan apa saja yang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni tidak di anggarkan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Tumin Indarto, selaku Kaur Pembangunan di Desa Guung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung kelambu beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu telah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain.

Tentang pertanyaan apa saja yang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 05 februari 2019, dengan bapak Hotman Sihombing, selaku Tokoh masyarakat di Desa Guung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung kelambu beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu telah sesuai dengan yang diharapkan beliau

mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa Gunung Kelambu untuk meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni sesuai dengan program pemerintah.

Tentang pertanyaan apa saja yang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja Pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan Dana Desa beliau mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni tidak ada kendala.

d. Adanya Transparansi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Jalopan, selaku kepala desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan bagaiman tranparansi yang dilakukan dalam pengelolan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan adanya itu RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan.

Tentang pertanyaan apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan desa dalam mentransparansikan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di pasanginya plang proyek pada setiap pengerjaan kegiatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan bapak Mugi Harto Cs, selaku sekretaris desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan bagaiman tranparansi yang dilakukan dalam pengelolan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan adanya itu RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan.

Tentang pertanyaan apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil

kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan desa dalam mentransparansikan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di pasang nya plang proyek pada setiap pengerjaan kegiatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 february 2019, dengan ibu Agustina, selaku Bendahara desa di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa.

Tentang pertanyaan bagaimana tranparansi yang dilakukan dalam pengelolan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan adanya itu RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan.

Tentang pertanyaan apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan desa dalam mentransparansikan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di pasang nya plang proyek pada setiap pengerjaan kegiatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 februari 2019, dengan bapak Efendi Parsaoran Tambunan, ketua Tim Pengelola Anggaran di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa.

Tentang pertanyaan bagaimana tranparansi yang dilakukan dalam pengelolan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan adanya itu RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan.

Tentang pertanyaan apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan desa dalam mentransparansikan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di pasanginya plang proyek pada setiap pengerjaan kegiatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Poltak Pakpahan, selaku ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau

mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan bagaimana transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan adanya musyawarah sebelum memulai suatu pekerjaan, menginformasikan jumlah anggaran yang di tentukan melalui plang proyek.

Tentang pertanyaan apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni tidak ada kendala.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan desa dalam mentransparansikan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di pasanginya plang proyek pada setiap pengerjaan kegiatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 06 februari 2019, dengan bapak Tumin Indarto, selaku Kaur Pembangunan di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan bagaimana transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan adanya

RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan.

Tentang pertanyaan apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan desa dalam mentransparansikan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di pasang nya plang proyek pada setiap pengerjaan kegiatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 05 februari 2019, dengan bapak Hotman Sihombing, selaku Tokoh masyarakat di Desa Gunung Kelambu.

Tentang pertanyaan apakah Pemerintahan Desa Gunung Kelambu sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa itu.

Tentang pertanyaan bagaimana tranparansi yang dilakukan dalam pengelolan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di tunjukkan melalui adanya musyawarah dan mufakat sebelum pengerjaan suatu kegiatan.

Tentang pertanyaan apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni tidak ada kendala.

Tentang pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintahan desa dalam mentransparansikan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu beliau mengatakan bahwa dengan di pasang nya plang proyek pada setiap pengerjaan kegiatan.

4.2. Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1. Adanya Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya kinerja dalam pemerintahan desa yang mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah. Meskipun tidak di pungkiri masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa. Adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan di awasi atau di pantau oleh seluruh lapisan masyarakat, kantip mas, babinsa, pihak kecamatan, inspektorat, PMD (Pemberdayaan Masyarakat desa) Tapanuli Tengah, dan melakukan semua pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Narasumber lain mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah. Meskipun tidak di pungkiri masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa. Adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan di awasi atau di pantau oleh seluruh lapisan masyarakat, kantip mas, babinsa, pihak

kecamatan, inspektorat, PMD (Pemberdayaan Masyarakat desa) Tapanuli Tengah, dan melakukan semua pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Narasumber lain mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah. Meskipun tidak di pungkiri masih ada faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa. Adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan desa membuat laporan akhir yang di tunjukkan kepada masyarakat.

Narasumber lain mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dan dalam setiap pelaksanaan sudah sesuai dengan Rapat Anggaran Biaya (RAB). Meskipun tidak di pungkiri masih ada faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa namun masih bisa di atasi dengan baik. Adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintah desa selalu membuat laporan akhir dan membuat rapat untuk mempertanggung jawabkan kepada desa setiap pekerjaan telah sesuai dengan apa yang sudah di musyawarah sebelumnya

Narasumber lain mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah. Meskipun tidak di pungkiri masih

ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa yakni faktor cuaca, suplai bahan yang terkadang tidak tepat waktu, dan kurangnya respon masyarakat dalam menghadiri undangan untuk bermusyawarah. Adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dan setiap pengerjaan kegiatan tidak di berikan kepada pihak ketiga atau dengan kata lain masyarakat desa secara suka rela bergiliran dalam setiap pengerjaannya. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis dan peraturan keuangan.

Narasumber lain mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus dengan mengedepankan musyawarah. Meskipun tidak di pungkiri masih ada faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan desa. Adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa pemerintahan di awasi atau di pantau oleh seluruh lapisan masyarakat, kantip mas, babinsa, pihak kecamatan, inspektorat, PMD (Pemberdayaan Masyarakat desa) Tapanuli Tengah, dan melakukan semua pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Narasumber lain mengatakan bahwa kinerja pemerintahan desa sudah bagus. Meskipun tidak di pungkiri masih ada faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa. Adapun hal-hal yang sudah di lakukan untuk

meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Dan Gunung Kelambu mengedepankan musyawarah dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori dan konsepsi kinerja yang menyatakan bahwa kinerja adalah wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari kinerja dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

4.2.2. Adanya Rencana Sesuai Dengan Pelaksanaan

Dari berdasarkan hasil wawancara tentang adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan dalam pemerintahan desa dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata. Dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan

pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman. Adapun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Sedangkan kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Narasumber lain mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata. Dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman. Adapun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Sedangkan kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Narasumber lain mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan lain-lain. Dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman. Adapun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Sedangkan kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Narasumber lain mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata. Dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman. Adapun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Sedangkan kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Narasumber lain mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan limbah, dan TPT (Tembok Penataan Tebing). Dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman. Adapun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Sedangkan kendala yang di hadapi dalam dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa hampir tidak ada.

Narasumber lain mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni perbaikan rambin, perkerasan jalan, pemaretan, pembayaran gaji honor Paud, pembayaran gaji honor guru mengaji/sekolah minggu, penanganan stunting, penambahan gizi untuk balita, dan inovasi desa yakni membuka jalan di lorong 4 atau objek wisata.

Dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu menggunakan petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman. Adapun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Sedangkan kendala yang di hadapi yakni terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Narasumber lain mengatakan bahwa adapun rencana pemerintahan Desa Gunung Kelambu dalam pengelolaan dana desa yakni pengembangan BUM Des, pengembangan perkampungan, pembuatan lubang larangan dan Lain-lain. Dalam mencapai rencana yang sudah di tetapkan pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah sesuai dengan yang di tetapkan dalam musyawarah desa. Adapun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang di tetapkan sebab ada beberapa program yang sifatnya berkesinambungan. Sedangkan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya tidak ada.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori dan konsepsi efektivitas dimana dinyatakan bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan rencana sehingga dalam hal ini bahwa hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa Gunung

Kelambu dalam menjalankan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.2.3 Adanya Sarana Dan Fasilitas Kerja Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dari berdasarkan hasil wawancara tentang adanya sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa dalam pemerintahan desa dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan. Dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama.

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan. Dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan. Dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan. Dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan namun masih perlu di maksimalkan lagi. Dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, alat-alat dan fasilitas lain. Adapun

faktor-faktor menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni tidak di anggarkan

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan. Dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni pengadaan laptop, meja dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni waktu pengagaran yang terkadang terlalu lama

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung kelambu sudah sesuai dengan yang di harapkan. Dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni sesuai dengan program pemerintah. Adapun faktor-faktor yang terkadang menjadi kendala pada sarana dan fasilitas kerja dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu yakni tidak ada kendala.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan konsepsi pengelolaan dimana dinyatakan bahwa setiap pengelolaan harus ada sarana dan fasilitas kerja yang memadai.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya sarana dan fasilitas kerja dalam

pengelolaan dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa Gunung Kelambu belum maksimal dalam hal sarana dan fasilitas kerja. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya alat kantor yang tidak lengkap atau pun memadai bukan hanya itu waktu penganggaran untuk fasilitas kerja juga kadang terlalu lama sehingga membuat terlambat setiap pengelolaan dana desa.

4.4.4. Adanya Transparansi

Dari berdasarkan hasil wawancara tentang adanya transparansi dalam pemerintahan desa dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa itu di tunjukkan melalui RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan. Adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa itu di tunjukkan melalui RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan. Adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa itu di tunjukkan melalui RKP

Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan. Adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa itu di tunjukkan melalui RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan. Adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa yakni ini ditunjukkan melalui adanya musyawarah sebelum memulai suatu pekerjaan, menginformasikan jumlah anggaran yang di tentukan melalui plang proyek. Adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni tidak ada kendala.

Narasumber lain mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa itu di tunjukkan melalui RKP Desa dan pembuatan papan proyek pada setiap pengerjaan item pembangunan. Adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni masyarakat yang terkadang masih kurang yakin dan sering curiga terhadap pengelolaan dana desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa pemerintahan Desa Gunung Kelambu Sudah transparan dalam pengelolaan dana desa itu di tunjukkan melalui adanya musyawarah dan mufakat sebelum pengerjaan. Adapun kendala yang sering di hadapi dalam mentransparansikan hasil kerja atau setiap kegiatan yang akan di lakukan yakni tidak ada kendala.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori dan konsepsi transparansi yang menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya transparansi dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah transparan dapat setiap pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah menjalankan kinerjanya dengan baik dalam setiap pengelolaan dana desa.
- 5.1.2. Pemerintahan desa Gunung Kelambu dalam menjalankan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 5.1.3. Pemerintahan desa Gunung Kelambu belum maksimal dalam hal sarana dan fasilitas kerja.
- 5.1.4. Pemerintahan desa Gunung Kelambu sudah transparan dapat setiap pengelolaan dana desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 5.2.1. Pemerintahan Desa Gunung Kelambu harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dana desa.
- 5.2.2. Pemerintahan Desa Gunung Kelambu harus lebih meningkatkan perumusan setiap rencana kegiatan agar sesuai dengan pelaksanaan

- 5.2.3. Pemerintahan Desa Gunung Kelambu harus lebih meningkatkan lagi sarana dan fasilitas kerja agar segala kegiatan pemerintahan dapat maksimal khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa
- 5.2.4. Pemerintahan Desa Gunung Kelambu harus lebih meningkatkan transparansi dalam hal pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kecurigaan penyelewengan oleh masyarakat terhadap pemerintahan desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Yogyakarta, Gava media.
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa, Yogyakarta*, Gosyen Publishing.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Pustaka Ilmu, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta, Taushia.
- Sujarweni, Wiratma. 2015. *Akuntansi Desa*, Yogyakarta, Pustaka Baru press.
- Tangkilising, hesel nogi. 2005. *Manajemen publik*. Jakarta, PT Grasindo.
- Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa, Jakarta*, PT Raja Grafindo Persada.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa